

MAIYAH: UPAYA PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DALAM KEBERAGAMAN DI INDONESIA

MAIYAH: AN EFFORTS TO DEVELOP PEACE IN DIVERSITY IN INDONESIA

Juang Pawana¹, Ichsan Malik², Adnan Madjid³

PRODI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK
FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL, UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA
(pawanajuang45@gmail.com, ichsanmalik@gmail.com, adnan.madjid@idu.ac.id)

Abstrak – Indonesia merupakan satu wilayah yang memiliki keragaman suku, budaya, dan agama yang begitu banyak. Ragam yang begitu banyak, membawa dampak yang cukup signifikan dengan hadirnya konflik sosial, seiring meruncingnya perbedaan. Gerakan Maiyah merupakan salah satu gerakan yang mencoba untuk melakukan dekonstruksi atas kondisi Indonesia saat ini dengan beberapa nilai yang ditawarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Gerakan Maiyah dalam konteks menjaga perdamaian pada kondisi Indonesia yang beragam. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan jenis fenomenologi. Sumber data penelitian didapatkan dari wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga nilai utama dalam gerakan Maiyah, ketiga nilai tersebut adalah pluralisme, spiritualitas yang cair, dan kesetaraan. Ketiga nilai yang ada dalam gerakan Maiyah kemudian menjadi motor dalam gerakan Maiyah untuk mewujudkan perdamaian di Indonesia. Adanya unsur kesetaraan dan egalitarian ini memungkinkan Maiyah untuk dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat menemukan solusi dan memediasi masalah-masalah sosial. Berdasarkan hasil penelitian, sangat direkomendasikan kepada berbagai pihak di pemerintahan untuk dapat berkolaborasi bersama dengan memunculkan nilai-nilai Maiyah di dalamnya

Kata Kunci: Maiyah, Perdamaian, Pluralisme, Keberagaman, Konflik sosial

Abstract – Indonesia is a region that has a lot of ethnic, cultural, and religious diversity. There are so many variations that have a significant impact on the presence of social conflicts, along with the sharpening of differences. The Maiyah Movement is one of the movements that tries to deconstruct the current condition of Indonesia with several values it offers. This study aims to analyze the Maiyah Movement in the context of maintaining peace in Indonesia's various conditions. The research method used is a qualitative method with a type of phenomenology. Sources of research data obtained from interviews, observations, and literature studies. The results showed that there were three main values in the Maiyah movement, these three values were pluralism, fluid spirituality, and equality. The three values in the Maiyah movement then became the motor for the Maiyah movement to bring peace in Indonesia. The existence of this equality and egalitarian element allows Maiyah to be accepted and trusted by the community as a place to find solutions and mediate social problems. Based on the research results, it is highly recommended for various parties in the government to collaborate by bringing out the Maiyah values in it.

Keywords: Maiyah, Peace, Pluralism, Diversity, Social Conflict.

Pendahuluan

Pasca pergerakan reformasi, banyak hal yang hilang selama orde baru

dan tidak dipulihkan di masa reformasi.

Akibatnya, Indonesia mengalami krisis moneter dan krisis sosial dan budaya

sehingga kemerosotan rasa percaya diri mengakibatkan menurunnya rasa nasionalisme serta kebangsaan (Huda, 2013). Kebebasan masyarakat menjadi euforia berlebihan yang sebelumnya terpenjara adalah akibat dari reformasi, akibat euforia yang berlebihan tersebut, memantik adanya niat dari pihak-pihak yang ingin mempertahankan sistem lama (Mujani, 2007). Beberapa pihak tersebut dalam pandangan penulis hanya fokus dapatkan keuntungan besar bagi diri mereka sendiri dan kelompoknya. Kelompok yang memelihara adat istiadat tersebut masih cukup besar sehingga mereka dapat mengadopsi cara-cara yang seringkali menimbulkan konflik etnis.

Faktor penegakan hukum yang masih lemah ditambah banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi di menengah kebawah dengan tingkat pendidikan yang Masih sangat rendah yang juga menyebabkan masyarakat mudah marah dengan isu SARA yang berujung pada konflik horizontal di masyarakat (McRae, 2016). Berdasarkan pandangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa konflik horizontal di Indonesia dapat menjelaskan bahwa pengaruh penguasa politik lebih besar daripada pengaruh ras atau

ketidakcocokan ras dalam masyarakat. Pandangan Azra (2016) mendukung hal ini, bahwa konflik antar partai mengarah pada pembentukan demokrasi yang mengarah pada sektarianisme, sehingga upaya perbaikan di bidang sosial, ekonomi dan budaya masih kurang, bahkan jika direformasi. Hal tersebut semakin melemahkan kekuatan reformasi dengan menimbulkan pecah belah masyarakat dengan menghembuskan sentimen SARA.

Cara penyelesaian konflik yang dilakukan selama ini menjadi Faktor-faktor pemicu konflik di era orde baru menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat di banyak daerah rawan konflik. Daerah dengan komposisi penduduk dan etnis telah mengalami pasang surut dan komposisi penduduk yang seimbang, sehingga rentan terhadap kemungkinan konflik dengan latar belakang agama dan etnis (Ubbe, 2011). Dalam konflik masyarakat, yaitu konflik yang terjadi antara dua kelompok atau satu kelompok masyarakat yang diserang oleh kelompok lain, kelompok masyarakat tersebut dapat didasarkan pada perbedaan ras, agama, kelas sosial, latar belakang politik, atau tempat tinggal. Apa yang terjadi

dengan konflik publik berdasarkan etnis, seperti Sangbas, Sangoledo dan Sangbit antara suku Dayak dan Madure. Selama ini model penyelesaian konflik menjadi model penegakan hukum yang ketat. Namun, hingga saat ini fakta di lapangan belum sepenuhnya damai, jadi ini hanya bantuan sementara, dan konflik bisa saja terjadi lagi di kemudian hari. Di saat yang sama, penyelesaian konflik separatis selalu menggunakan tindakan militer. Misalnya di Aceh bahkan diorganisir menjadi zona operasi militer yang memakan ribuan korban jiwa selama operasi tersebut. Demikian pula di Papua, model operasi militer selalu diusulkan, dan oleh karena itu, hanya ada sedikit kemajuan dalam kesempatan untuk menyelesaikan konflik berdasarkan musyawarah atau dialog. Di era baru reformasi, konflik separatisme diselesaikan melalui Perjanjian Aceh Helsinki, "Undang-Undang Otonomi Khusus" dan diundangkannya Papua.

Gerakan Baku Bae merupakan suatu penyelesaian konflik yang berhasil di Ambon dengan cara yang cukup menarik yaitu kombinasi antara peran pemerintah yang didukung oleh peran masyarakat sipil (civil society) disatu sisi yang merupakan model yang dimotori oleh Malik (2014) dari Lembaga Titian

Perdamaian. Model kombinasi model kegiatan permukiman tersebut dapat dijadikan contoh, dan kedua belah pihak berperan bersama dan saling mendukung. Peran negara yang terlalu kuat dan represif pada akhirnya akan memunculkan kembali perlawanan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah harus mendorong dan memperkuat masyarakat dengan mendorong solusi berdasarkan mekanisme lokal, solusi tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah kecil atau kecil pemerintah daerah (seperti desa). Sebaliknya, peran sosial yang terlalu kuat juga dapat menyebabkan anarki, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah ini jelas berbahaya. Mungkin ada persidangan skala besar, deportasi, dan bahkan pembunuhan atas nama komunitas. Harus ada upaya sistematis untuk menggabungkan keduanya untuk memberikan ruang dan lokasi yang seimbang di antara keduanya (Malik, 2017).

Perkembangan itu terjadi sejak tahun 1990-an. Telah ada kegiatan komunitas yang disebut Maiyah. Maiyah berasal dari kata ma'a yang artinya "bersama". Maiyah digunakan untuk menunjukkan persatuan atau keberadaan pada waktu, tempat atau tempat yang sama (Effendy, 2009). Selain itu, Maiyah

atau Unity juga berarti menjaga, membantu, melindungi dan mengontrol. Maiyah adalah sebuah gerakan sosial, dibandingkan dengan topik lainnya, Maiyah telah menjadi wadah perbincangan dimana diskusi komunitas dapat dilakukan tentang topik apapun dan jawaban dapat diberikan melalui dialog yang dapat memberikan jawaban tanpa ingin lebih saling mengenal. Jika Anda tidak menyadarinya, diskusi, pengajian atau obrolan di Maiyah memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi gejolak konflik sosial di masyarakat. Ajak orang untuk benar-benar melihat realitas sosial dengan cara yang jelas.

Maiyah bisa menjadi metode ampuh dalam mewujudkan perdamaian. Jama'ah Maiyah, baik secara individu maupun komunal, sempat menjadi juru damai atas konflik yang terjadi di daerah masing-masing. Dalam Maiyah yang dilakukan dalam melakukan pengamanan bukannya menutup pintu, tapi malah membuka pintu. Dengan pintu yang terbuka maka akan terjadi saling kenal dan memahami satu sama lain. Segala sesuatu yang diawali dengan mengenali diri dan orang lain akan menciptakan keamanan. Dalam Maiyah, kejujuran merupakan hal yang

sangat dijunjung tinggi. Meneladani Rasulullah Saw yang kejujurannya diakui siapa pun dan bahkan musuhnya pun mengakui. Oleh sebab itu dalam Maiyahan, orang Maiyah dilatih untuk berpikir jernih, bersikap jujur. Proses Maiyah adalah proses bercermin untuk mengenal diri sendiri.

Sebagai salah satu gerakan yang mengusung perdamaian sebagai tema pokok yang diperjuangkan, Maiyah merupakan satu gerakan yang unik. Keunikan Maiyah terdapat pada absennya pola-pola organisasi umum yang biasanya ada. Pendekatan yang dilakukan oleh gerakan Maiyah pada dasarnya menyerupai gerakan perdamaian lain di dunia yang mengedepankan unsur pemersatu dan menghilangkan sekat identitas. Hal ini biasa disebut sebagai konsep salad bowl atau usaha untuk menjaga persatuan dengan tetap mempertahankan identitas dan warna masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Konsep salad bowl menurut Advani dan Reich (2015) adalah sebuah konsep yang meletakkan persatuan dan kerja sama antar individu di atas identitas masing-masing. Kolaborasi dan kerja sama antar masyarakat menjadi penting dan menjadi

highlight dalam proses pembangunan perdamaian.

Perdamaian dan upaya-upaya untuk memepertahankan perdamaian telah menjadi concern selama bertahun-tahun. Hal ini dianggap penting karena hanya dengan adanya perdamaian maka akan ada keamanan nasional yang selalu dicita-citakan. Keamanan nasional merupakan sebuah konsep yang erat sekali dengan stabilitas sebuah bangsa dan negara. Keamanan nasional dapat dipahami sebagai sebuah kondisi yang aman dan tenang, sehingga masyarakat dan bangsa yang hidup di dalamnya dapat berfungsi baik secara sosial maupun secara ekonomi. Cita-cita Maiyah sebagai sebuah gerakan yang berusaha untuk menumbuhkan perdamaian di Indonesia dalam kerangka perbedaan memiliki relevansi yang kuat terhadap terjalannya keamanan nasional. Bahwa cita-cita keamanan nasional tidak akan tercapai tanpa adanya perdamaian akan menjadi argumen utama dalam diskursus tentang Maiyah dan keamanan itu sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu solusi dari metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks lisan dan

tulisan dari pengamat. Menurut Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara utuh fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata dan bahasa dalam konteks alamiah yang khusus. Dan menggunakan berbagai metode alami (Siyoto & Sodik, 2015).

Model fenomenologi dipakai dalam penelitian ini karena mencoba untuk menangkap makna yang terbebas dari struktur kasuistik. Menurut Ahmed (2010) pendekatan fenomenologi menekankan adanya objek dan penglihatan yang *verstehen* atau mendalam dan tidak terlepas dari konteks. Sehingga objek akan benar-benar terlihat secara jelas tanpa mengurangi esensi atau sedikitnya paling mendekati kebenaran. Oleh karena itu, model ini dipilih oleh peneliti, karena dalam penelitian ini akan sangat bergantung pada konteks dan objek kajian. Adanya penggambaran yang jelas pada konsep akan membuat hasil penelitian akan lebih mengerucut dan memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang lebih komprehensif.

Hasil Penelitian

Di era baru reformasi kebijakan secara nominal menguntungkan bagi

kepentingan rakyat yaitu otonomi daerah dengan tiga komponen utama: desentralisasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Namun penggunaan aplikasi ini tidak serta merta mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat. Ada istilah yang bermakna seperti "korupsi daerah" dan "raja kecil", merujuk pada pemimpin daerah yang tidak menjalankan tugas rakyat. Lemahnya integritas para pemimpin daerah juga menimbulkan konflik spasial di wilayah tersebut, misalnya hilangnya lapangan kerja (pertanian dan lautan) oleh investor dan rusaknya lingkungan akibat industrialisasi investor telah membuat investor dan masyarakat membentuk konflik yang jelas. Selain itu, belum ada kinerja terbaik dari kemampuan penegakan hukum dan/atau perhatian terhadap beberapa pelanggaran HAM di masa lalu. Dalam konteks kontemporer, sistem demokrasi yang direformasi tidak dapat menciptakan kesetaraan bagi minoritas. Hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik masyarakat.

Keadaan dan kondisi ini menyebabkan hilangnya tanda-tanda keaslian semangat demokrasi yang muncul pada reformasi 1998. Narasi

sebenarnya dari banyak reformasi terpinggirkan oleh ingatan kolektif negara, atau disebabkan oleh elit politik yang berusaha untuk menang. narasi sejarah setelah 1998. Dan orang-orang munafik dijalankan oleh para reformis itu sendiri. Era pasca reformasi sendiri memiliki efek tandingan terhadap semangat demokrasi. Upaya mewujudkan cita-cita reformasi telah terdistorsi, sehingga yang diutamakan bukanlah kepentingan rakyat, melainkan inkonsistensi kepentingan para elit yang melaksanakan semangat demokrasi (Anugerah dan Endiartia, 2018).

Efek dari suasana pasca Reformasi 1998 yang belum bisa menjalankan amanah reformasi dengan optimal maka konflik di beberapa daerah terjadi. Rasa tidak saling percaya secara masif merebak semakin luas di masyarakat. Dalam menangani hal tersebut pemerintah lebih mengedepankan penyelesaian secara pendekatan keamanan dan Top down. Sehingga eskalasi konflikpun menambah besar. Peran masyarakat tidak dioptimalkan sehingga budaya dialog di masyarakatpun semakin berkurang dan cenderung terstigma segala permasalahan diberi solusi dengan cara penegakkan hukum.

Menurut Hidayah (2018) disadari atau tidak, praktik politik yang tengah dijalani justru menjauh dari nilai dan substansi demokrasi yang kita cita-citakan. Sistem demokrasi kita terjebak dalam ritus prosedural lima tahunan yang semata berorientasi pada raihan elektoral. Demokrasi kita mengalami kebuntuan hal tersebut disebabkan di satu sisi kita mengalami defisit negarawan sedangkan di sisi lain, di waktu yang bersamaan kita mengalami surplus politikus berwatak Machiavellian. Watak Machiavellian itu terlihat jelas dalam perilaku politik para elite yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Alhasil, politik menjadi tidak lebih dari semacam ajang berebut dan berbagi kue kekuasaan. Menjadi wajar jika panggung politik kita nyaris tidak pernah sepi dari kegaduhan dan perdebatan semu tanpa ada pendidikan politik yang baik.

Sedangkan, dengan alasan mendapatkan pendidikan politik, publik justru lebih banyak disuguhi isu-isu yang tidak menyentuh aspek fundamental-substansial. Para elite politik mereka lebih sibuk mengarahkan opini massa dengan cara-cara kotor, mulai dari mengumbar ujaran kebencian sampai mengeksploitasi sentimen identitas. Mereka tidak lagi

semangat membangun gerakan untuk memperjuangkan nilai serta ideologi yang diyakininya. Polarisasi yang terjadi dengan maraknya ujaran kebencian dan sentimen identitas itu telah melahirkan semacam kondisi ketidak beraturan dan ketidakpastian yang mewarnai berbagai aspek kehidupan. Konsekuensinya, kehidupan berbangsa dan bernegara kita tahun-tahun belakangan ini berjalan tanpa haluan tujuan yang jelas.

Wacana politik berkembang jauh membelakangi idealitas yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Sementara sector ekonomi mengalami fluktuasi kronis: kemiskinan dan kesenjangan sosial masih saja menjadi problem klasik. Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi pada ranah sosial-budaya yang harus menghadapi turbulensi nilai tanpa henti. Semua situasi ini kemudian berujung pada satu kondisi hiperdemokrasi, yakni suatu kondisi ketika demokrasi berjalan tanpa kendali. Setiap orang bisa tampil sebagai entitas yang mengklaim kebebasan individunya sebagai representasi dari konsep kebebasan mutlak. Ia dengan mudah menghujat, memfitnah, mengancam, mendeskreditkan siapa saja yang berseberangan dengannya dengan mengatasnamakan demokrasi.

Dalam konteks masyarakat umum akar rumput, arus besar hiperdemokrasi itu memunculkan semacam ledakan politik keluar (political explosion). Masyarakat terpecah menjadi entitas-entitas kecil yang berkarakter agresif. Masing-masing memandang lawan politiknya dengan penuh kecurigaan, bahkan kebencian. Kondisi ini semakin bemasalah ketika media massa yang seharusnya berperan sebagai eksponen penting dalam memproduksi informasi yang netral dan memancing nalar kritis publik justru terjebak ke dalam logika kapitalistik-sektarian. Sudah menjadi keumuman, sejumlah media massa secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya pada kekuatan politik tertentu. Tidak jarang pula mereka menjadi alat propaganda bagi kepentingan elite atau partai politik tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Masyarakat Indonesia telah lama dianggap sebagai masyarakat yang multi agama dan budaya yang terdiri dari berbagai agama, kepercayaan, ras, ras, budaya dan kelompok. Mengenai keberagaman ini, nenek moyang bangsa Indonesia mewarisi semangat toleransi,

penuh kedamaian, dan mengakui pluralisme agama dan kesatuan kebenaran. Namun keberagaman ini dapat menimbulkan potensi konflik di masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bersama, kerukunan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerukunan juga sering diartikan sebagai kondisi sosial yang damai, saling menghargai, damai, sejahtera, hormat, tepasarira, toleransi dan gotong royong yang kesemuanya sesuai dengan ajaran agama. Dalam keaneka ragaman tersebut pada masyarakat sejak dahulu sudah muncul budaya dialog sebagai upaya saling memahami satu sama lain dan sebuah metode yang mendasari musyawarah. Salah satu contoh dari budaya dialog itu adalah Cangkrukan.

Dalam banyak hal, cangkrukan telah digunakan sebagai model untuk mengidentifikasi konstruksi identitas yang terbentuk dalam kebiasaan cangkrukan di kedai kopi, dan memberikan fungsi sosial bagi kebiasaan cangkrukan di kedai kopi. Peran cangkrukan di kedai kopi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga

sosiokultural hingga sosiopsikologis. Melalui budaya cangkrukan, setiap warga negara dapat mengidentifikasi dirinya secara netral tanpa perlu mengkhawatirkan diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Dalam sebuah kedai kopi, setiap orang berpartisipasi dalam hubungan sosial satu sama lain, realitas ini menciptakan kohesi sosial yang hidup di masyarakat perkotaan. Terbentuknya solidaritas organik di kedai kopi membuktikan betapa manusia membutuhkan kehadiran orang lain dalam diri manusia, bukan mengandalkan satu atau dua karakter kuat, tetapi memiliki harapan dan keyakinan yang sama antara satu dengan yang lain (Santoso, 2017).

Kuatnya budaya dialog yang merupakan buah dari kebersamaan yang sering bertemu dan berinteraksi maka muncul di masyarakat sebuah peribahasa: *Mang ora mangan kumpul*. Peribahasa tersebut memiliki makna bahwa disaat senang ataupun disaat sulit tetaplah bertemu untuk bersatu atau rukun. Dialog juga mendasari budaya gotong – royong karena jika tidak diawali dengan dialog maka niscaya tidak akan terjadi budaya gotong – royong. Sedangkan gotong – royong merupakan ciri khas dari masyarakat bangsa Indonesia sejak

dahulu kala. Itulah fakta bahwa gotong – royong adalah buah dari budaya dialog. Sesuai dengan budaya Indonesia suatu konflik atau permasalahan akan lebih cepat terselesaikan jika dialog dari pihak yang berkonflik itu baik dan intens. Selain itu dalam menjaga dan membangun perdamaian yang sudah adapun dialog antar semua pihak adalah cara yang efektif di masyarakat sejak dahulu kala. Karena dengan dialog yang sering maka semua pihak yang beragam akan saling memahami satu sama lain sehingga membangun rasa saling percaya dan akan berusaha mencari solusi terbaik untuk semua.

Maiyah merupakan kegiatan pengajian yang penuh ceramah dan diskusi yang diusahakan oleh Cak Nun (Emha Ainun Najib), walaupun standar yang biasa dijumpai dalam kegiatan pengajian belum benar-benar menjadi arus utama, karena rencana maiyah mengajarkan semangat hidup, sikap toleransi, dan hidup bersama dalam kontribusi yang baik. Maiyah, setiap kegiatannya memiliki tema yang berbeda-beda. Jemaat memiliki kesempatan untuk mempresentasikan, menyangkal, membenarkan atau menuduh juru bicara apa yang dikatakan pembicara dalam diskusi yang diadakan Maiyah.

Selain itu, di Maiyah juga sarat dengan tiga dimensi nilai dalam karya Cak Nun, materi pengetahuan dan pemikiran tersebut dapat tercermin dalam setiap pembahasan. Pertama, tingkat spiritual dan religius. Di sini, karya Cak Nun dianggap mencerminkan semangat keagamaan yang dikandung oleh tasawuf. Cak Nun berpikir dan mengkritik masalah sosial melalui mistisisme ini, dengan tujuan membebaskan umat manusia dan membebaskan masyarakat dari belenggu ketidakadilan. Dimensi kedua dari nilai adalah nilai pergerakan, yang merupakan proses melanjutkan "keberadaan" menuju keabadian (beberapa tahun), sedangkan dimensi ketiga dari nilai adalah ciri utama dari analisis logis. Dimensi ini merupakan hasil dari aspek rasionalisme pemikiran Mbah Nun.

Meskipun dimensi rasionalitas Cak Nun ini tidak berada dalam lingkup reaksi pemikiran keagamaan, tetapi lebih dalam lingkup latar belakang sosial, nyatanya rasionalisme Cak Nun sangat mengakar dalam pemikirannya. Artinya, pandangan religius intuitif Sufisme Cak Nun didukung oleh rasionalitasnya. Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemikiran Cak Nun mengandung

tiga nilai ideologis: idealisme-spiritualisme, dualisme-teisme, dan rasionalisme. Di sisi lain, Cak Nun juga memiliki gaya berpikir etis tasawuf yang khusus, termasuk jenis pemikiran yang memiliki nilai teologis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan menjadi telaah, terdapat beberapa nilai inti dalam gerakan Maiyah selalu disebarkan dalam upaya menjaga perdamaian. Beberapa nilai inti tersebut diantaranya adalah.

a. Pluralisme

Salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Maiyah adalah penyebaran nilai pluralisme yang sangat kental dilakukan. Penyebaran ini akan sangat terlihat dengan tidak adanya sekat kelompok dan agama dalam setiap gelaran Maiyah dilakukan. Oleh karena itu setiap orang dalam giat Maiyah akan secara langsung dan tidak langsung membaur dan berkomunikasi dengan banyak orang secara luas. Selain itu, adanya ragam narasumber yang tidak terbatas pada satu kelompok dan perspektif membuat pandangan dan gagasan bertemu dan bersilaturahmi dengan bebas.

b. Spiritualisme Yang Cair

Adanya unsur spiritual merupakan salah satu unsur yang juga terlihat dengan sangat jelas di Maiyah. Unsur spiritual yang dikembangkan, merupakan pola spiritual yang dengan mudah diaplikasikan dan juga diimplifikasikan ke dalam setiap kelompok masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemaksaan dan penggunaan musik sebagai sarana untuk mensebarluaskan nilai tersebut. sehingga, setiap orang yang ada dalam lingkaran Maiyah akan secara tidak langsung terlibat dalam pergulatan spiritual dengan tidak ada satu keterpaksaan.

Spiritualisme yang cair bisa mewujudkan saling memahami pandangan spiritual yang berbeda sehingga tidak muncul saling menghakimi justru akan muncul saling memahami dan menghargai serta menjaga harmonisasi dari perbedaan yang ada. Hal ini sejalan dengan teori salad bowl yang masing-masing berperan sesuai peran masing-masing dengan kekhasannya namun saling menghargai serta menjaga

harmonisasi dari perbedaan yang ada. Selain itu tidak adanya paksaan dalam pergulatan spiritual akan mewujudkan perdamaian bersama karena akan menyatu dalam kesadaran diri sebagai makhluk Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa yang sudah selajaknya mewujudkan perdamaian bersama. Hal ini juga sesuai dengan teori perdamaian.

c. Kesetaraan

Maiyah juga menawarkan adanya kesetaraan pada setiap orang yang ada di dalam kegiatan Maiyah. Kesetaraan ini terbentuk lantaran Maiyah tidak membatasi pihak yang berbicara dan mendengar. Demikian halnya posisi yang tidak membedakan letak dan panggung. Sehingga siapapun dapat turut serta berdiskusi tanpa takut dan khawatir atas perbedaan status sosialnya. Hal ini sangat sesuai dengan teori Salad Bowl yaitu menganggap perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang ada dan bisa disatukan dengan masing-masing merasa setara dan menghargai satu sama lain.

Kesetaraan juga menjadi salah satu unsur yang harus ada dalam

menjaga dan menciptakan perdamaian maka jelas kesetaraan yang diusung oleh Maiyah juga sesuai dengan teori perdamaian. Karena perdamaian mustahil akan terwujud jika tidak ada kesetaraan karena salah satu potensi konflik adalah adanya ketimpangan satu sama lain. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Septian (2020) juga nampak bahwa tema berkaitan dengan egalitarian menjadi poin yang utama untuk diangkat. Sehingga Maiyah tidak membedakan setiap kalangan yang akan turut serta dalam kegiatan di Maiyah.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis yang telah dikembangkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Beberapa poin kesimpulan dalam penelitian ini diantaranya adalah.

Terdapat beberapa nilai-nilai inti yang diangkat maiyah dalam upaya menjaga perdamaian dalam keberagaman di Indonesia. Nilai tersebut adalah pluralisme, Spiritualisme yang cair, kesetaraan dan persaudaraan sesama

manusia sebagai makhluk Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa.

Pola Gerakan Maiyah Dalam Menjaga Perdamaian Dalam Keberagaman Di Indonesia dilakukan dengan Sinau bareng atau forum diskusi kebangsaan bersama yang menggunakan metode melingkar dengan melibatkan kesenian budaya lokal. Memberikan ruang bagi siapa saja untuk berdialog dengan semangat diskusi bukan debat agar bisa menyampaikan pendapat secara bebas bertanggung jawab tetap menjaga keamanan semua, keselamatan semua serta kedamaian semua sehingga dengan sendirinya saling memahami dan menghormati. Hal itu mewujudkan solusi dari permasalahan yang dihadapi bersama.

Secara umum gambaran Gerakan Maiyah dalam menjaga perdamaian dalam keberagaman di Indonesia ikut menyelesaikan beberapa konflik yang ada di Indonesia seperti konflik di Lampung di daerah Rawajitu Mesuji, Penyelesaian korban lumpur Lapindo dan konflik Dayak Madura dengan pendekatan kemanusiaan dan kulutral. Kemudian Maiyah pun terbukti mampu ikut menjaga perdamaian dalam keberagaman di DKI Jakarta sesuai yang disampaikan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tahun 2019. Begitupun dalam setiap simpul mayyah di Indonesia selalu menjaga perdamaian dengan semangat persaudaraannya.

Nuansa Islam yang ada tidak menjadi hambatan dengan menjaga perdamaian dalam keberagaman justru mayyah mampu menunjukkan Islam dengan mencontoh akhlaq Rosulullah Muhammad Saw dengan menebar Rohmatan Lil'alamin yang memahami keberagaman adalah suatu keniscayaan dari Allah SWT. Sehingga kebaikan bersama yang saling mengamankan demi keadilan dan kesejahteraan bersama yang menjadi tujuan bersamanya. Hal ini sangat mendukung Konsep Keamanan Nasioanal yang digalakan oleh negara dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat di Indonesia yang beragam ini.

Daftar Pustaka

Anugerah, B., & Endiartia, J. J. (2018). Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 6(2), 23-41.

Ahmed, S. (2010). Vithetens fenomenologi. *Tidskrift för genusvetenskap*, (1-2), sid-48.

Advani, A., & Reich, B. (2015). *Melting pot*

or salad bowl: the formation of heterogeneous communities (No. W15/30). IFS Working Papers.

Azra, A. (2016). *Transformasi politik Islam: radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi*. Kencana.

Hidayah, A. R. (2018). Persecution Act as Filter Bubble Effect: Digital Society and The Shift of Public Sphere. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 112-126.

Huda, M. Q. (2013). Relasi Budaya dan Kuasa dalam Konstruksi Islam Kultural Pasca-Reformasi. *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 3(1), 146-180.

Malik, I. (2017). *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas.

Mujani, S. (2007). *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.

Septian, M. D. (2020). *Retorika Dakwah Emha Ainun Nadjib "Cak Nun" Dalam Pengajian Maiyah Kenduri Cinta Jakarta* (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).

Ubbe, A. (2011). *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik*. Kementerian Hukum dan Ham. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.